



RENJA

Rancangan Rencana Kerja

Kantor Camat Linggo Sari Baganti
Kabupaten Pesisir Selatan



TA. 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan karunianya, Kecamatan Linggo Sari Baganti telah bisa menyelesaikan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2021, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 21 ayat (3) tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa kepala OPD menyiapkan Renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2021 ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan, program kerja serta kegiatan Kecamatan Linggo Sari Baganti, agar pelaksanaan agenda pembangunan OPD lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur selain itu juga dibahas tentang permasalahan serta upaya penanganannya.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Rancangan Rencana Kerja Tahun 2021 ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing-masing bidang yang membidangi masing-masing bidang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan laporan ini. Kemudian Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini, kami ucapkan terimakasih, Semoga Allah SWT memberkahi kerja kita, amin.

Air Haji, 15 Juni 2021

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

AHMAD HIDAYAT, SSTP, M.Sc

NIP. 19830608 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	
2. Landasan Hukum	
3. Maksud dan Tujuan	
4. Sistematika Penulisan	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2019	
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah	
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. . .	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	
3. Tujuan dan Sasaran Renja Kec. Linggo Sari Baganti	
4. Program dan Kegiatan	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi ,menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.”

dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang meliputi 145 rincian wewenang yang perlu terus dioptimalkan pelaksanaannya dilapangan.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian ditingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Kampung, Nagari dan kecamatan serta Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintah Kecamatan berkewajiban membuat Renstra dan melaporkannya kepada Bupati.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2016-2021 yang diorientasikan untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan untuk 5 (Lima) tahun kedepan khususnya di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Ruang lingkup Rencana Kerja (Renja) adalah pelaksanaan kegiatan Kecamatan Linggo Sari Baganti dalam 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai, Rencana Kerja Kecamatan Linggo Sari Baganti mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2021, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Kecamatan Linggo Sari Baganti ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2021.
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Linggo Sari Baganti pada Tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan Program dan Kegiatan Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2021 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015-2025.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan.
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Linggo Sari Baganti dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 disusun dalam 5 (lima) Bab yang terdiri dari :

BAB I : Merupakan BAB pendahuluan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan Hasil Evauasi Rencana Kerja Tahun Lalu yang membahas evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Linggo Sari Baganti tahun lalu dan

capaian Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti, analisa kinerja pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Linggo Sari Baganti, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : Berisi mengenai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Linggo Sari Baganti yang membahas mengenai telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Daerah, serta program dan kegiatan

BAB IV : Berisi mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2019

Kinerja Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan pengukuran kinerja, Kecamatan Linggo Sari Baganti membandingkan antara kinerja nyata / realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Kinerja Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti tercermin dalam pencapaian sasaran- sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan Tahun 2019. Dalam usaha mencapai sasaran, Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 12 (dua belas) program sebagai indikator kinerja pencapaian sasaran dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2019 dapat diamati sebagai mana berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019

No	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Revisi	Jumlah Dana Setelah Revisi	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6
IX.	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	523.567.000	523.566.950	523.479.450	99.98
A.	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	260.793.338	274.445.200	274.445.200	100.00
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.164.000	4.638.500	4.638.500	100.00
	a. Belanja Barang dan Jasa	3.164.000	4.638.500	4.638.500	100.00
2.	Penyediaan Jasa Administras Keuangan	47.400.000	53.900.000	53.900.000	100.00
	a. Belanja Pegawai	47.400.000	53.900.000	53.900.000	100.00
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	54.912.000	55.177.500	55.177.500	100.00
	a. Belanja Pegawai	52.000.000	52.000.000	52.000.000	100.00
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.912.000	3.177.500	3.177.500	100
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.968.748	29.068.674	29.068.674	100
	a. Belanja Barang dan Jasa	22.968.748	29.068.674	29.068.674	100
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.807.090	16.154.326	16.154.326	100.00
	a. Belanja Barang dan Jasa	12.807.090	16.154.326	16.154.326	100.00
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.479.000	3.479.000	3.479.000	100.00
	a. Belanja Barang dan Jasa	3.479.000	3.479.000	3.479.000	100.00
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000	3.240.000	3.240.000	100.00
	a. Belanja Barang dan Jasa	2.100.000	3.240.000	3.240.000	100.00
8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	44.962.500	25.904.700	25.904.700	100.00
	a. Belanja Barang dan Jasa	44.962.500	25.904.700	25.904.700	100.00
9.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	16.350.000	16.350.000	16.350.000	100.00
	a. Belanja Barang dan Jasa	16.350.000	16.350.000	16.350.000	100.00

	10.	Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah	52.650.000	66.535.000	66.532.500	100.00
		a. Belanja Barang dan Jasa	52.650.000	66.535.000	66.532.500	100.00
B.		PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	112.904.000	117.648.500	117.648.500	100.00
	1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	59.500.000	46.700.000	46.700.000	100.00
		a. Belanja Modal	59.500.000	46.700.000	46.700.000	100.00
	2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	7.900.000	7.900.000	7.900.000	100
		a. Belanja Barang dan Jasa	7.900.000	7.900.000	7.900.000	100
	3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12.300.000	12.300.000	12.300.000	100
		a. Belanja Barang dan Jasa	12.300.000	12.300.000	12.300.000	100
	4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	30.284.000	39.748.500	39.748.500	100.00
		a. Belanja Pegawai	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100.00
		b. Belanja Barang dan Jasa	23.784.000	33.248.500	33.248.500	100.00
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.920.000	4.000.000	4.000.000	100.00
		a. Belanja Barang dan Jasa	2.920.000	4.000.000	4.000.000	100.00
	6	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas		7.000.000	7.000.000	100.00
		a. Belanja Modal Pengadaan		7.000.000	7.000.000	100.00
C.		PROG. PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	6.855.000	7.685.000	7.685.000	99.74
	1.	Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.685.000	7.705.000	7.685.000	99.74
		a. Belanja Barang dan Jasa	6.855.000	7.705.000	7.685.000	99.74
D.		PROG. PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	4.497.412	5.015.000	5.010.000	99.90
	1.	Fasilitasi Masalah Trantib dan Pertanahan	4.497.412	5.015.000	5.010.000	99.90
		a. Belanja Barang dan Jasa	4.497.412	5.015.000	5.010.000	99.90
E.		PROG. PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	12.750.000	12.750.000	12.750.000	100.00
	1.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	12.750.000	12.750.000	12.750.000	100
		a. Belanja Barang dan Jasa	12.750.000	12.750.000	12.750.000	100

F.	PROG. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT/NAGARI		58.405.750	52.282.500	52.267.500	99.97
	1. Pembinaan PKK Kecamatan		36.132.500	30.325.000	30.315.000	99.97
	a. Belanja Barang dan Jasa		36.132.500	30.325.000	30.315.000	99.97
	2. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong		17.555.000	15.085.000	15.080.000	99.97
	a. Belanja Barang dan Jasa		17.555.000	15.085.000	15.080.000	99.97
	3. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Olaharaga		4.718.250	6.872.500	6.872.500	100.00
	a. Belanja Barang dan Jasa		4.718.250	6.872.500	6.872.500	100.00
G.	PROG. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN		3.800.000	1.100.000	1.100.000	100.00
	1. Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN		3.800.000	1.100.000	1.100.000	100.00
	a. Belanja Barang dan Jasa		3.800.000	1.100.000	1.100.000	100.00
H.	PROG. PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA		16.762.500	600.000	600.000	100.00
	1. Pagelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah		16.762.500	600.000	600.000	100.00
	a. Belanja Barang dan Jasa		16.762.500	600.000	600.000	100.00
I.	PROG. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		15.634.500	12.894.500	12.864.500	99.77
	1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		15.634.500	12.894.500	12.864.500	99.77
	a. Belanja Barang dan Jasa		15.634.500	12.894.500	12.864.500	99.77
J.	PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		4.630.000	4.630.000	4.630.000	100
	1. Fasilitasi Capaian Penerimaan PBB-P2		4.630.000	4.630.000	4.630.000	100
	a. Belanja Barang dan Jasa		4.630.000	4.630.000	4.630.000	100
K.	PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NAGARI		9.623.000	14.600.000	14.600.000	100.00
	1. Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Pemerintah Nagari		9.623.000	14.600.000	14.600.000	100.00
	a. Belanja Barang dan Jasa		9.623.000	14.600.000	14.600.000	100.00
L.	PROG. PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH		16.911.500	19.893.750	19.878.750	99.92
	1. Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan		16.911.500	19.893.750	19.878.750	99.92
	a. Belanja Barang dan Jasa		16.911.500	19.893.750	19.878.750	99.92
	J U M L A H		523.567.000	523.566.950	523.479.450	99.98

Sumber: CALK Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2019.

Selanjutnya terkait dengan rekapitulasi pencapaian terhadap sasaran yang ditetapkan dapat diamati lebih rinci sebagaimana terlampir pada **dan Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti s/d Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Selatan.**

Keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran indikator kinerja, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat ketertiban administrasi Kecamatan di Bidang Pemerintahan (terkoordinasinya Kecamatan dan nagari, terlayannya masyarakat untuk administrasi pemerintahan Kecamatan).
 - a. Meningkatnya kerja sama dan koordinasi serta meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Linggo Sari Baganti, di dukung dengan adanya kegiatan :
 - 1) Penyediaan sarana dan prasarana administrasi dan jasa administrasi perkantoran.
 - 2) Rakor Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Nagari.
 - b. Meningkatnya SDM Aparatur nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan serta meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat, di dukung dengan adanya kegiatan :
 - 1) Pembinaan Administrasi Keuangan Nagari
2. Tingkat ketertiban administrasi Kecamatan dan Nagari di Bidang Pembangunan (ketersediaan prioritas pembangunan wilayah, terfasilitasinya penyelenggaraan musrenbang, terfasilitasinya pemenuhan / penanganan target pembayaran PBB, IMB, SP3, terfasilitasinya dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan

wilayah). Terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan wilayah, di dukung dengan adanya kegiatan :

- a. Rapat Dinas Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan.
 - b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan.
3. Meningkatnya peran TP PKK Kecamatan dan Nagari dalam pemberdayaan perempuan, serta meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan di nagari, di dukung dengan adanya kegiatan :
1. Fasilitasi Kegiatan PKK
 2. Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Tercapainya target PBB di Kecamatan Linggo Sari Baganti

Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya terkait dengan keberhasilan yang telah di capai oleh Kecamatan Linggo Sari Baganti sendiri, juga tidak dapat dielakkan dan dipungkiri bahwa juga terdapat berbagai masalah/kendala yang dihadapi dimulai dari perencanaan awal hingga dalam proses pelaksanaannya, adapun beberapa masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian perencanaan strategis yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Bidang pembangunan, dimana program dan kegiatan yang telah dimusyawarahkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten.
2. Pelayanan terhadap masyarakat yang kurang maksimal, karena hanya sebagian kecil dari jenis pelayanan, baik perizinan maupun non-perizinan yang dapat dilakukan di tingkat kecamatan.

Meskipun demikian, sehubungan dengan permasalahan yang timbul Kecamatan Linggo Sari Baganti selalu berupaya mengatasi persoalan tersebut sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka perlu dilakukan beberapa langkah dalam penyelesaian/pemecahan terhadap masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. Mengadakan koordinasi dengan dinas instansi tingkat Kabupaten.
2. Meningkatkan intensitas pembinaan ke pemerintahan Nagari untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada di Nagari.
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.

4.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Linggo Sari Baganti dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Kinerja Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Layanan Administrasi perkantoran
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja
3. Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya
4. Persentase Nagari yang menerapkan lingkungan sehat
5. Persentase penegakan perda dan Persentase permasalahan trantibum yang ditindak lanjuti
6. Persentase produk unggulan yang difasilitasi dalam produksi dan pemasaran
7. Persentase PKK nagari yang aktif, persentase KAN yang aktif, Persentase LPM yang aktif membina kelompok dan Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif
8. Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan

9. Peringkat MTQ Pesisir Selatan, Persentase ASN dan Sekolah yang mengikuti PHBI, Persentase lembaga didikan subuh yang dikunjungi dan Persentase jumlah kunjungan tim pemda.
10. Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI

4.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Linggo Sari Baganti

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Nagari;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar Seksi;
6. Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu Kecamatan yang kurang memadai;
7. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
8. Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang Memanjang dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai.

a. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk melakukan perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan, hal ini perlu dilakukan dikarenakan seiring berjalannya proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Linggo Sari Baganti yang dikemudian hari ditemukan beberapa hal baik penambahan atau kemunculan program baru yang awalnya tidak direncanakan ataupun perubahan yang terjadi dalam hal kebutuhan akan anggaran.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas berhubungan dengan review terhadap rancangan awal rkpD maka akan dapat dilihat dari ketersediaan dana atau pagu awal yang ditetapkan oleh yang berwenang sehingga kemungkinan mengakibatkan jumlah atau besaran dana pada masing-masing kegiatan akan menyesuaikan sendiri tergantung tingkat prioritas suatu kegiatan/program tersebut.

Menindaklanjuti sebagaimana di atas, maka dapat di bandingkan bahwa berdasarkan renstra ataupun Rancangan Awal, kebutuhan dana untuk tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat	Terlaksananya pembayaran rekening air dan listrik	100%	3.164.000	100%	3.650.000	
2.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	kantor Camat	Terlaksananya pembayaran honor dan operasional	100%	47.400.000	100%	49.700.000	
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor Camat	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan)	100%	54.912.000	100%	54.912.000	
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Camat	Tersedianya alat tulis kantor	100%	22.968.748	100%	26.760.500	
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kantor Camat	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	12.807.090	100%	14.566.600	
6.	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Camat	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan dalam pelayanan kantor	100%	3.479.000	100%	3.500.000	
7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Camat	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	100%	2.100.000	100%	4.500.000	
8.	Penyediaan makanan dan minuman	Kantor Camat	Tersedianya makan minum rapat, harian dan tamu	100%	44.962.500	100%	34.250.500	
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Luar Kabupaten	Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah	100%	16.350.000	100%	19.400.000	

10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	Pesisir Selatan	Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah	100%	52.650.000	100%	65.950.000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur								
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas	Kantor Camat	Tersedianya peralatan kantor	100%	59.500.000	-	40.000.000	
12.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	Kantor Camat	Terawatnya Rumah Dinas (bln)	100%	7.900.000	100%	15.000.000	
13.	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Kencaraan Dinas	Terawatnya / Gedung Kantor	100%	12.300.000	100%	20.900.000	
14.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kantor Camat	Kelancaran perjalanan dinas	100%	30.284.000	100%	39.780.000	
15.	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung kantor	Rumah Dinas	terpeliharanya peralatan kantor	100%	2.920.000	100%	5.560.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	Pendidikan dan Pelatihan formal	Aparatur Kecamatan	Meningkatnya SDM kantor camat	-	-	-	-	Sementara ditiadakan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								
17.	Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan	Jumlah Nagari yang dilayani	100%	6.855.000	100%	7.000.000	
Program Pemeliharaan ketrantibmas dan pencegahan tindak kriminal								
	Fasilitasi masalah trantib dan pertanahan		Jumlah nagari yang difasilitasi	100%	4.497.412	100%	4.200.000	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
18.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Kecamatan	jumlah pelaksanaan PHBN	100%	12.750.000	100%	18.950.000	
Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan ekonomi Masyarakat/Nagari								
19.	Pembinaan PKK Kecamatan	Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan	100%	36.132.500	100%	47.520.500	

	Pembinaan Bulan Bakti Gontong Royong		Tersdianya biaya bulan bakti gotong royaong ke nagari	100%	17.555.000	100%	19.765.000	
	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Olah raga		pembinaan yang dilakukan	100%	4.718.250	100%	7.850.000	
Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan								
20.	Fasilitasi Penyelenggaraan Paten	Kecamatan	terselenggaraya pelayanan PATEN	100%	3.800.000	100%	3.300.000	
Program pengembangan pemasaran pariwisata								
21.	Pergelaran seni budaya dan potensi daerah	Kecamatan	Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal	100%	16.762.500	100%	22.800.000	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
22.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kecamatan	Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	100%	15.634.500	100%	17.400.500	
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah								
23.	Fasilitasi penerimaan P2	Kecamatan	jumlah nagari yang difasilitasi	100%	4.630.000	100%	4.825.000	
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari								
24.	Pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan pemerintah nagari	Kecamatan	Laporan keuangan pemerintahan nagari yang akuntabel	100%	9.623.000	100%	10.300.000	
Program Pemantapan Otonomi Daerah								
	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	Kecamatan	Terlaksananya koordinasi musika	100%	16.911.500	100%	19.700.000	
	JUMLAH				523.567.000		582.040.600	

b. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan pada umumnya adalah bersifat kegiatan penunjang dari pemerintah daerah sehingga kegiatan yang ada saat ini pada tataran pemerintah kecamatan adalah berupa program/kegiatan lanjutan. Hal tersebut menjadikan kecamatan bertindak sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan urusan dalam bentuk program atayupun kegiatan pemerintah.

Pada dasarnya dalam mengusulkan suatu program/kegiatan kecamatan dituntut membuat suatu gambaran terhadap kecamatan itu sendiri yang nantinya akan dibawa dalam pembahasan bersama dalam institusi kecamatan dengan memperhatikan gejala dan kondisi terkait pelimpahan wewenang dari kabupaten. Adapun secara keseluruhan program dan kegiatan yang ada merupakan lanjutan atau penunjang dari pemerintah daerah kabupaten sendiri sehingga dapat dikatakan keberadaan program dan kegiatan dari kecamatan merupakan akar dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintah di tingkat dibawahnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagaimana terdapat dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memberikan pemahaman mengenai tata cara penyusunan Renja PD yang terdapat pada pasal 119 s.d 143 jo pasal 82 s.d 84.

Selanjutnya berdasarkan pasal 221 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Sehingga secara umum kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan umum yang merangkum seluruh kegiatan pemerintahan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Linggo Sari Baganti

a. Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2021, mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

pada tahun 2021, yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang RPJPD Tahun 2015-2025 dan Hasil Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Dimana tujuan pembuatan Renja Tahun 2021 lebih terfokus kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencapaian program pembangunan, serta pemeliharaan infrastruktur kantor. Adapun tujuan renja adalah berdasarkan kepada renstra kecamatan adalah Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

b. Sasaran

Adapun sasaran dari Rencana Kerja Tahun 2021 sesuai Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Layanan Administrasi perkantoran
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja
3. Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya
4. Persentase Nagari yang menerapkan lingkungan sehat
5. Persentase penegakan perda dan Persentase permasalahan trantibum yang ditindak lanjuti
6. Persentase produk unggulan yang difasilitasi dalam produksi dan pemasaran
7. Persentase PKK nagari yang aktif, persentase KAN yang aktif, Persentase LPM yang aktif membina kelompok dan Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif
8. Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan
9. Peringkat MTQ Pesisir Selatan, Persentase ASN dan Sekolah yang mengikuti PHBI, Persentase lembaga didikan subuh yang dikunjungi dan Persentase jumlah kunjungan tim pemda.
10. Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja disajikan bersama indikator kinerja, sedangkan program disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan, sehingga rencana kerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan oleh indikator kinerja kegiatan. Perumusan program dan kegiatan yang dibuat merupakan program dan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur oleh peraturan yang lebih tinggi di atasnya terutama peraturan-peraturan ditingkat kabupaten yang merupakan sebagai tindak lanjut dari peraturan di atasnya lagi sampai peraturan skala nasional. Pelaksanaan program dan kegiatan telah disesuaikan dengan isu-isu pembangunan pada era saat ini, karena secara tidak langsung dapat dipahami dengan keberadaan kecamatan yang bersifat penunjang di tingkat pemerintah terendah dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan kata lain apa yang dilakukan pemerintah kecamatan adalah demi tercapainya harapan pemerintah yang lebih tinggi di atasnya.

Rencana Kerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2021 direncanakan akan melaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) program yang terbagi dalam 25 (dua puluh lima) kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan dalam berbagai hal seperti: koordinasi, fasilitasi/mediasi, pemberdayaan/pembinaan, dan lain-lain baik yang bertujuan bagi masyarakat langsung, kelompok-kelompok tertentu, pemerintahan nagari, adat dan lain-lain.

Adapun secara rinci dapat di uraikan pada **Tabel 3.1 tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022**, sebagaimana terlampir.

Kemudian terkait dengan hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan renja ini merupakan sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan

kedepannya, namun tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaan berjalan baik dari program/kegiatan maupun dana/pagu indikatif yang disediakan sesuai dengan kondisi dan hal-hal penting lainnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sumber Dana yang Dibutuhkan untuk Menjalankan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2021 berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Selanjutnya, berkaitan dengan Rincian Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun depan (2021) secara rinci mengenai Rencana Program dan Kegiatan Tahun pada lampiran.

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Linggo Sari Baganti dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Linggo Sari Baganti ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan Barat secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2021, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan

- oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
 5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan.

Demikianlah Rencana Kerja tahun anggaran 2021 ini dibuat sebagai evaluasi terhadap kinerja dari Kantor Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus untuk menjadi kajian dalam pelaksanaan pada tahun anggaran berikutnya.

Air Haji, 15 Juni 2021
CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

AHMAD HIDAYAT, SSTP, M.Sc
NIP. 19830608 200112 1 002